

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keamanan Internasional yang dinamis dapat menciptakan suatu ketidakamanan terhadap aktor negara, kondisi perang di Ukraina memberikan bukti nyata bahwa negara harus memiliki kemampuan untuk mengamankan posisinya dalam sistem internasional. Perang Rusia-Ukraina sejak tahun 2022, memberikan ujian mengenai kesiapan pertahanan negara-negara Eropa dalam menangani eskalasi dan penyebaran konflik yang dapat terjadi kapan saja. Industri Pertahanan Eropa mengalami tantangan terkait mobilisasi pasukan, kepemilikan alutsista. Selain itu, biaya untuk memulai dan membangun industri pertahanan bukanlah hal yang mudah dan instan, negara-negara Eropa secara terpaksa bertindak untuk lebih mandiri dalam mengamankan keamanannya (The Straits Times, 2025).

Sejak era Kepresidenan Emmanuel Macron, Prancis bertekad untuk terus mendorong peningkatan kerjasama pertahanan antar sesama negara Eropa. Hal tersebut terlihat dari Pidato Emmanuel Macron dalam pertemuan Uni Eropa di Sorbonne tahun 2017. Macron berpidato mengajak negara-negara Eropa melakukan kerjasama keamanan guna mengintegrasikan semua angkatan bersenjata dan pertahanan Eropa (Elysee, 2017). Pidato tersebut menggambarkan peran Prancis dalam menjalankan perpolitikan global dalam keamanan internasional. Langkah tersebut disebabkan oleh dinamika politik keamanan global yang terus berkembang, yang menuntut

Prancis harus mampu beradaptasi dan menyeimbangkan kondisi yang akan diterima.

Prancis bertekad untuk menyeimbangkan ancaman keamanan global melalui berbagai bentuk kebijakan balancing, utamanya dalam menghadapi Rusia. Hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan anggaran pertahanan dalam negeri melalui kebijakan Military Programming Act (Auran, 2024). Prancis memandang Rusia dalam perangnya di Ukraina sebagai ancaman, hal tersebut dijelaskan dari hasil kutipan Kementerian untuk Eropa dan Luar Negeri Prancis, “Dengan melancarkan perang melawan negara yang berdaulat, Rusia secara sengaja melanggar prinsip Piagam PBB. Mendukung kemerdekaan Ukraina bukan hanya membantu rakyat untuk merdeka, namun juga membela hukum internasional dan keamanan benua Eropa” (Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, 2025).

Sejak 2022, Prancis memberikan bantuan kepada Ukraina dan berlanjut hingga 2025. Bantuan tersebut terdiri dari bantuan kemanusiaan dan bantuan militer berupa pemberian alutsista ringan hingga berat. Melalui laman Kementerian Luar Negeri Prancis, sejak September 2024 Prancis telah mengalokasikan sebesar €434 juta Euro untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada Ukraina, bantuan tersebut disalurkan langsung kepada otoritas Ukraina maupun melalui proyek-proyek yang dilakukan oleh Organisasi Internasional seperti agen PBB dan NGO dalam berbagai sektor. Adapun bantuan kemanusiaan juga dialokasikan untuk kesehatan, perlindungan keamanan makanan dan mata pencaharian, perlindungan terhadap sipil dan Hak Asasi Manusia, aksi untuk penanganan air, higienitas

dan sanitasi, edukasi dan informasi, dan negara serta projek “A Ship for Ukraine” (Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, 2024).

Prancis memberikan total bantuan keamanan sebanyak €3,8 miliar Euro, sejak Desember 2023. Dari total €3.8 miliar, sebesar €2,6 miliar sendiri disalurkan untuk bantuan alutsista yang terdiri dari perlengkapan personel, sistem optik, sistem anti tank, Artileri, Ground to Air Defence, Kendaraan lapis baja, kendaraan transportasi, watercraft, bensin, Amunisi, surface to air missile, sistem transmisi, drones, alat pendukung elektrik, peralatan taktis, dan persenjataan kecil. Di luar bantuan finansial, Prancis sejak 2022 juga memberikan bantuan berupa pelatihan kepada 10.000 tentara Ukraina di Polandia dan di Prancis, selain itu Prancis juga berkontribusi dalam mengamankan sisi Timur Eropa dengan mengirimkan pasukan darat di Rumania dan Estonia, kemudian mengirimkan pasukan udara secara rotasi di Lithuania dan mengamankan aktivitas maritim secara permanen di Laut Baltik dan Mediterania (Ministère des Armées, 2024).

Hubungan Prancis dengan Ukraina berlanjut dengan diadakannya kerjasama keamanan antar dua negara pada tahun 2024, hal ini didasarkan pada kesamaan kepentingan dalam bidang pertahanan dan menegaskan pentingnya Ukraina sebagai calon negara anggota NATO pada masa mendatang, serta memberikan keamanan integral Euro-Atlantik, berkontribusi terhadap stabilitas Eropa, dan global (Elysee, 2024). Hal ini menandai adanya upaya awal pembentukan aliansi bagi kedua negara, yang kemudian dilanjutkan dengan dibentuknya *Coalition of the Willing* di tahun 2025 yang memperdalam peran Prancis untuk melakukan kerjasama dengan

Ukraina melawan Rusia, melalui dukungan militer yang berfokus pada sistem pertahanan udara Ukraina (Elysee, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep balancing yang dipergunakan Prancis untuk menyeimbangkan ancaman yang diterima melalui peningkatan militer dalam negeri dan membuat aliansi dengan Ukraina. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa balancing banyak digunakan untuk mengamankan kepentingan nasionalnya.

Terdapat berbagai penelitian terdahulu yang menggunakan balance of threat dalam menganalisis ancaman yang diterima. Seperti “Revisiting Balance of Threat Theory: The Case of Contemporary Southeast Asia in the Context of Great Power Contestation” karya Rizky Widian, penelitian tersebut menjelaskan tentang adanya rivalitas antara Tiongkok dengan Amerika Serikat di Asia Tenggara menciptakan berbagai bentuk balancing oleh negara-negara di Asia Tenggara baik dilakukan dengan cara mendekati diri kepada Amerika Serikat secara ringan dan memilih untuk terus berhubungan dengan Tiongkok meskipun sering dianggap sebagai ancaman (Widian, 2021, 59).

Selanjutnya penelitian “Balance of Threat Analysis in Resolving the Diplomatic Crisis of Qatar and Saudi Arabia in 2017-2020” karya Triesanto Romulo Simanjuntak, penelitian ini menjelaskan upaya balancing yang dilakukan Qatar terhadap Arab Saudi yang memiliki krisis diplomatik. Qatar kemudian melakukan berbagai upaya seperti peningkatan kekuatan

dalam negeri dan berdiplomasi secara luas di dunia global (Simanjuntak, 2020, 58).

Kemudian terdapat artikel karya Hajira Ahmed berjudul “Balance of Threat Vs. Balance of Power in Geopolitics”. Artikel ini menjelaskan tentang upaya Australia yang memandang Tiongkok sebagai ancaman di wilayah Indo-Pasifik yang menyebabkan Australia berupaya untuk membentuk kerjasama trilateral dengan Amerika Serikat dan Inggris bernama AUKUS, hal ini disebabkan ancaman yang ditimbulkan Tiongkok dalam segi keamanan dan ekonomi mendorong Australia untuk condong ke arah Amerika Serikat (Ahmed, 2024).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diterangkan oleh penulis maka dapat disimpulkan rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Strategi Balancing Prancis terhadap kekuatan Rusia pada Periode 2022 - 2025?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah Skripsi sekaligus sebagai tugas akhir sebagai salah satu persyaratan mendapatkan gelar S1 Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik, UPN “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Penelitian ini secara khusus memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana strategi balancing Prancis terhadap kekuatan Rusia pada periode 2022-2025?

1.4 Kerangka Teori/Konsep

1.4.1 Balance of Threat

Terdapat kerangka teori yang dipergunakan dalam penelitian ini, yakni Teori *Balance of Threat* yang dikemukakan oleh Stephen M. Walt dalam karyanya *The Origins of Alliances*.

“States are expected to form alliances to counter perceived threats. The theory posits that when a state possesses high levels of aggregate power, geographic proximity, offensive capabilities, and aggressive intentions, nearby states will seek to balance against it”.

Walt menjelaskan bahwa negara-negara cenderung membentuk aliansi untuk menghadapi ancaman yang mereka persepsikan. Menurutnya, ketika suatu negara memiliki tingkat kekuatan agregat yang tinggi, berada dalam kedekatan geografis, memiliki kapabilitas ofensif yang signifikan, serta menunjukkan intensi agresif, maka negara-negara di sekitarnya akan terdorong untuk melakukan penyeimbangan terhadap negara tersebut (Walt, 1987).

Teori *balance of threat* terdiri dari empat variabel utama. Pertama, *Aggregate Power*, yang merujuk pada total sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara, termasuk kekayaan alam, jumlah populasi, kapasitas ekonomi, dan kekuatan militer. Semakin besar kekuatan agregat suatu negara,

semakin besar pula potensi negara tersebut dipersepsikan sebagai ancaman. Kekuatan ini tidak hanya dilihat dari jumlah, tetapi juga dari kemampuan mobilisasi yang mampu mengubah status quo.

Kedua, *Geographical Proximity*, yaitu kedekatan geografis yang meningkatkan persepsi ancaman karena negara yang berada dalam jarak dekat lebih mudah memproyeksikan kekuasaan. Kedekatan wilayah sering kali dibentuk oleh sejarah panjang interaksi, baik berupa kerja sama maupun konflik, sehingga aspek geografis menjadi faktor strategis dalam menentukan siapa yang dianggap sebagai ancaman maupun sekutu.

Ketiga, *Offensive Capabilities*, yakni kemampuan suatu negara untuk melakukan operasi militer ofensif. Negara yang memiliki kapabilitas menyerang yang tinggi cenderung menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara di sekitarnya, terutama jika kemampuan tersebut memungkinkan pelaksanaan invasi secara efektif dan dalam skala besar.

Keempat, *Aggressive Intentions*, yang merujuk pada niat atau perilaku suatu negara yang dipersepsikan agresif. Jika sebuah negara memiliki kekuatan militer yang besar, letak geografis yang strategis, serta aktif dalam kebijakan luar negeri dan diplomasi namun menunjukkan itikad damai, maka negara tersebut tidak secara otomatis dianggap sebagai ancaman. Sebaliknya, apabila negara tersebut menampilkan perilaku agresif, negara-negara di sekitarnya akan terdorong untuk menyeimbangkan ancaman tersebut, baik melalui peningkatan kapabilitas pertahanan maupun pembentukan aliansi strategis.

Untuk menyeimbangkan ancaman yang dihadapi, aktor akan aktif dalam melakukan *external balancing* melalui menjalin kerjasama untuk memperkuat maupun memperluas aliansi. Aliansi tersebut dibentuk berdasarkan adanya kesamaan tujuan untuk menyeimbangkan ancaman yang diterima dan bersifat fleksibel terlepas dari kesamaan ideologi, pertemanan maupun institusi.

1.4.2 Internal Balancing

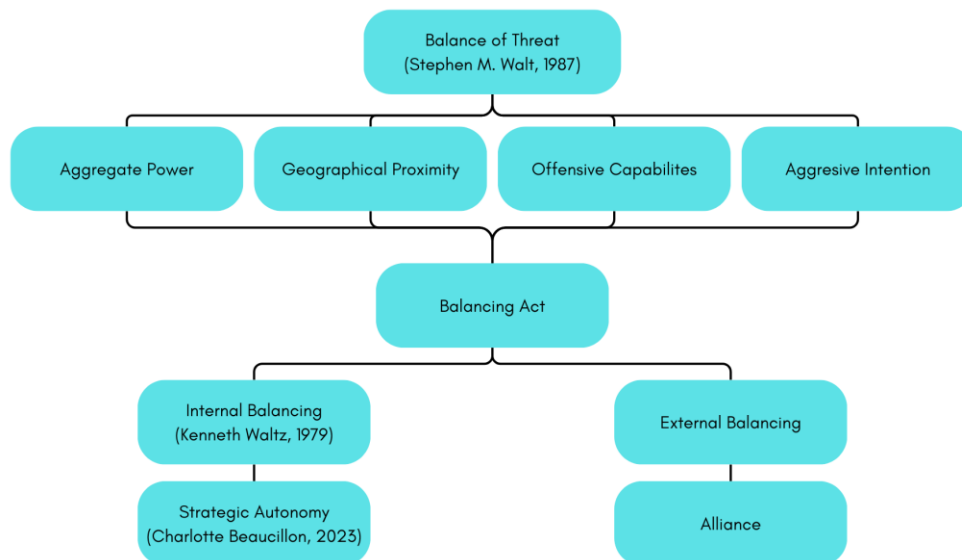
Menurut Kenneth Waltz, terdapat upaya *balancing* yang dapat dilakukan selain *external balancing* yaitu *internal balancing*, hal ini merupakan upaya meningkatkan kemampuan negara melalui investasi militer, peningkatan kapasitas administrasi dan mobilitas, meningkatkan otonomi negara melalui penguasaan sektor-sektor strategis seperti energi, pertahanan, teknologi dan peningkatan kapasitas ekonomi berdampak terhadap kekuatan militer dalam negeri agar mampu menyamai posisi negara lain. Waltz menjelaskan bahwa di dalam dunia yang anarki, keberlangsungan institusi internasional bergantung terhadap sikap negara anggota, sehingga peran negara tetap menjadi yang terpenting dalam meningkatkan keamanan nasional (Waltz, 1979, 168).

1.4.3 Strategic Autonomy

Konsep *Strategic Autonomy* menurut Charlotte Beaucillon merepresentasikan kapasitas suatu aktor politik untuk menetapkan tujuan strategisnya secara mandiri serta memobilisasi sumber daya yang diperlukan guna mencapai tujuan tersebut pada berbagai domain utama,

seperti pertahanan, teknologi, ekonomi, dan hubungan eksternal. Dalam pandangan Beaucillon konsep ini mencerminkan upaya untuk mengurangi ketergantungan eksternal dan memperkuat kemampuan aktor dalam mengambil keputusan serta bertindak secara efektif di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompetitif (Beaucillon, 2023: 418–419).

1.5 Bagan Sintesa



Adapun bagan sintesa yang disusun oleh penulis adalah konsep *Balance of Threat* karya Stephen Walt yang menjelaskan negara akan merespon suatu ancaman secara eksternal apabila aktor tersebut memiliki kekuatan agregat yang sama, kedekatan geografis, memiliki kapabilitas untuk menyerang dan memiliki niatan untuk agresif. Selanjutnya, terdapat dua upaya balancing berupa *external balancing* dengan berfokus dalam menciptakan aliansi untuk menyeimbangkan ancaman yang diterima.

Kemudian, *internal balancing* yang berfokus dalam meningkatkan kekuatan dari dalam negeri menggunakan konsep dari Kenneth Waltz melalui pendekatan *Strategic Autonomy* milik Charlotte Beaucillon.

1.6 Argumentasi Utama

Penerapan kebijakan balancing Prancis dipergunakan sebagai mekanisme untuk menyeimbangkan ancaman yang berasal dari Rusia dapat dilihat melalui empat variabel. Pertama, Aggregate Power dalam penelitian ini diamati melalui perbandingan kekuatan antara Prancis dan Rusia, yang menunjukkan power Rusia yang besar melebihi Prancis di berbagai aspek militer seperti jumlah personel militer aktif dan perdagangan alutsista global. Kedua, Geographical Proximity Rusia memiliki kehadiran signifikan di kawasan yang dapat mengancam Prancis dikarenakan Rusia berbatasan langsung dengan negara Uni Eropa dan NATO. Ketiga, Offensive Capabilities, yakni kapabilitas ofensif Rusia yang besar sebagai negara dengan kekuatan militer besar di dunia melalui kepemilikan alutsista yang beragam, salah satu negara dengan kepemilikan bom nuklir, dan mampu untuk melaksanakan operasi militer skala terbatas maupun besar di seluruh wilayah di dunia serta secara tidak langsung memiliki pengaruh dengan negara-negara Sahel Afrika bekas jajahan Prancis. Keempat, Aggressive Intentions yang diamati adalah perilaku dan kebijakan luar negeri Rusia yang agresif dalam mengamankan kepentingan nasionalnya dengan mendukung dan mengakui gerakan Separatis Donbass dan Luhansk di Ukraina serta melancarkan invasi kepada Ukraina pada 2022.

Selanjutnya, Prancis melakukan upaya balancing melalui dua hal, yakni internal balancing dan external balancing. Internal Balancing dilakukan melalui peningkatan kekuatan pertahanan dalam negeri dengan memperbesar anggaran bidang militer menggunakan pendekatan *Strategic Autonomy*. Kemudian, upaya eksternal balancing dengan menjalin aliansi dengan Ukraina dalam melawan Rusia melalui bantuan kemanusiaan dan bantuan militer, kerjasama pertahanan hingga pengiriman pasukan perdamaian untuk menjaga Ukraina pasca perang.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah tipe deskriptif. Menurut Batterjee penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berfokus pada observasi secara mendalam dan detail sebuah dokumentasi atas suatu fenomena yang diteliti. Observasi tersebut didasarkan metode ilmiah (Bhattacharjee, 2012, 5-6).

1.7.2 Jangkauan penelitian

Penelitian “Analisis Strategi balancing Prancis terhadap kekuatan Rusia pada Periode 2022 - 2025” pemilihan periode 2022 disebabkan oleh dimulainya ancaman dari Rusia yang melakukan invasi kepada Ukraina mendorong adanya upaya penyeimbangan yang kuat oleh Prancis, penelitian dilanjut hingga periode 2025 sebagai bentuk dari dibentuknya aliansi antara Prancis dengan Ukraina.

1.7.3 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi literatur, dalam bentuk tulisan, gambar dan karangan dari sumber sumber terpercaya seperti artikel, jurnal, laporan penelitian, internet, dan lainnya. Teknik studi literatur ini dilakukan agar dapat menjawab teori-teori yang relevan terhadap permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Sehingga dapat menyelesaikan masalah yang diteliti dan menarik kesimpulan berdasarkan teori-teori tersebut (Kelly et al., 2024, 617). Proses studi literatur dilakukan dengan cara melakukan mencari dan mengumpulkan informasi yang diterima mengenai variabel-variabel kebijakan balancing yang dipergunakan Prancis dalam merumuskan dalam menyeimbangkan ancaman yang datang dari Rusia.

1.7.4 Teknik analisa data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian adalah teknik analisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari observasi, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, yang diakhiri dengan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Kelly et al., 2024)

1.7.5 Sistematika Penulisan

BAB 1 : Pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, sintesis pemikiran, argumen utama, serta metodologi penelitian. Metodologi penelitian terdiri dari tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB 2: Membahas aspek-aspek Balance of Threat dalam studi kasus, dimulai dari aggregate Power, Geographical Proximity, Offensive Capabilities dan Aggressive Intention Rusia terhadap Prancis dan Ukraina.

BAB 3: Membahas upaya balancing secara internal melalui Strategic Autonomy dan eksternal oleh Prancis terhadap Rusia melalui pembentukan aliansi bersama Ukraina

BAB 4: Penutup, berisi ringkasan hasil penelitian dan bukti dari argumentasi awal, serta memberikan rekomendasi untuk penelitian di masa mendatang.